

GERAKAN DAKWAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP PENYEBARAN DAN PENERIMAAN ISLAMISME KELOMPOK RADIKAL- TERORISME DI LAMPUNG

Abdul Syukur
IAIN Raden Intan Lampung
abdulsyukur_iainril@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari kegelisahan akan narasi Islamisme dalam artian penerimaan dan penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh kelompok salafi di Lampung sebagai respon dari proses demokrasi pasca reformasi yang dihadapkan pada kepentingan ideologi politik yang pro demokrasi dan kontra demokrasi. Dengan analisis praksis, penulis menemukan bahwa pertama, konstruksi narasi Islamisme yang dikembangkan oleh kelompok radikal di tengah masyarakat Lampung hanya radikal dalam pemikiran Islamisme dan tidak mengarah pada radikalisme gerakan radikalisme dan terorisme. Kelompok radikal dan sesat ini jumlahnya kecil. Kedua, narasi-narasi Islamisme yang tersebar oleh kelompok radikal dengan berbagai pola penyebaran dan faktor-faktor penyebarannya pula dengan melakukan identifikasi dan memfasilitasi transmisi Islamisme secara umum tidak diterima oleh masyarakat Islam Lampung yang mayoritas merupakan kelompok Islam moderat Lampung. Ketiga, narasi-narasi Islamisme di Lampung secara umum tidak memiliki resonansi yang kuat di tengah masyarakat Lampung, sebab masyarakat Lampung mayoritas penduduknya beragama Islam yang moderat, serta Budaya Lampung Piil Pesanggiri dan Adat Muakhi sangat menolak tindakan kekerasan bahkan terorisme..

Kata Kunci: *Budaya Lampung, Salafi, Radikal Terorisme*

Abstract

DA'WAH AS THE EARLY PREVENTION EFFORTS AGAINST THE SPREAD AND ACCEPTANCE OF ISLAMISM IN RADICAL TERRORISM IN LAMPUNG: This paper is set out from the anxiety if the anarchism in term of acceptance and the spread of Moslem which is done by certain group of salafi in Lampung as the response of the democracy process after reformation era in order to face the political ideology that is pro-democracy and contra with democracy. With a practical analysis, the authors found that the construction of narrative Islamism developed by radical groups in society Lampung only radical Moslem didn't lead to radicalism and terrorism. The number of the radical group is small. The narratives Islamism spread by radical groups with different patterns of deployment and distribution factors by which identifying and facilitating the transmission of Islamism is generally not accepted by the majority of the Islamic community in Lampung. Most of Lampung people lead the moderate Islamic and cultural Lampung Piil Pesanggiri and Adat Muakhi which are rejected the terrorism.

Keywords: *Lampung Cultural, Salafi, Radical Terrorism.*

A. Pendahuluan

Manusia memiliki status yang multiperan, ia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial (*social human*) selalu melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai nilai kehidupan yang mendorong mereka untuk beraktivitas melalui interaksi sosial dalam mencapai tujuan mereka. Di antaranya, manusia membutuhkan nilai religius, maka mereka melakukan aktivitas agama untuk membentuk kesalehan sekaligus meraup pahala sebagai bekal kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akherat kelak, yang merupakan tujuan dari masyarakat beragama (*social religious*). Manusia juga membutuhkan nilai kuasa, maka mereka pun termotivasi untuk beraktivita politik karena manusia juga sebagai *zoon politicon*, yakni masyarakat politik (*social political*) sekaligus masyarakat sosial (*social community*).

Manusia sebagai makhluk sosial yang berusaha memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan tentang nilai religius, nilai

kuasa, nilai keadilan, nilai sosial dan kekerabatan, mereka melakukannya dengan interaksi. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial terbangun karena adanya kontak sosial dan proses komunikasi, di mana manusia melakukan interaksi sosial yang terjadi antara perorangan dengan kelompok, kelompok dengan perorangan, kelompok dengan kelompok lain, dan perorangan dengan perorangan yang lain dalam mencaai tujuan bersama.¹ Menurutnya, interaksi sosial adalah dasar proses-proses sosial, yang menunjukkan pada pola hubungan sosial yang dinamis; dan interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial.²

Dalam konteks ini, interaksi sosial sangat berguna dalam memperhatikan dan mempelajari banyak masalah dalam masyarakat, baik masalah yang terkait dengan kehidupan sosial-politik, sosial-keagamaan, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan sebagainya yang merupakan sistem sosial kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Di Indonesia, termasuk di wilayah Lampung, pascareformasi mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang berlangsung antara berbagai suku, kelompok atau golongan, dalam mencapai tujuan mereka adalah “ditandai oleh euphoria kebebasan dengan aktor utama gerakan *civil society*” sebagai cerminan atmosfir politik pasca reformasi.³ Aktor utama gerakan *civil society* didorong oleh ingin kembali pada demokrasi, yang selama Orde Baru system demokrasi tersumbat oleh kekuasaan rezim Presiden Soeharto.

Dibukanya kran demokrasi melalui gerakan itu, bertujuan untuk memperoleh nilai kuasa yang berkeadilan dan aspiratif bagi semua masyarakat (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang representatif di Negara Republik Indonesia. Aktor politik yang mengusung gerakan demokrasi mendapat simpatik dari publik dalam melakukan konsolidasi gerakan-gerakan *civil society*

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Cv. Rajawali Press, 1982), hlm. 54-58.

² *Ibid.*, hlm. 54

³ Ridwan al-Makassari dan Ahmad Gaus (ed.), *Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo*, (Kajarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 1.

sebagai konsep kunci atau factor kunci “proses demokrasi yang diarahkan pada upaya memperluas ruang kebebasan tersebut.”⁴

Namun demikian, ungkap Ridwan dan Ahmad Gaus, bahwa:

Pendulum kebebasan tampaknya tidak serta-merta bergerak ke arah demokrasi yang diinginkan. Alih-alih kebebasan menyeruak tak terbendung, tetapi justru melahirkan ironi-ironi baru yang berseberangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Anarkisme atas kebebasan terjadi di mana-mana. Konflik horizontal dan vertikal menjadi fenomena umum, dengan skala besar maupun kecil. Sejumlah argument bisa dibangun untuk menjelaskan mengapa euphoria kebebasan justru mendorong demokrasi ke titik nadir dan melahirkan fakta-fakta keras. Di antaranya adalah, karena ruang demokrasi diperebutkan oleh kelompok-kelompok sosial yang terbentuk dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. ... dalam konteks ini, ada dua bentuk penegasan identitas politik, yang pro dan kontra demokrasi.⁵

Fenomena sosial-politik mengenai frame demokrasi di Indonesia, yang melahirkan *distingsi* pemahaman, arah, dan tujuan gerakan demokrasi antara kelompok pro demokrasi dan kelompok kontra demokrasi, bukan saja terjadi di kalangan elit politik dan elit agama, terutama kelompok Islam. Hal ini ditegaskan oleh Ridwan dan Ahmad Gaus:

Identitas politik, kelompok pro demokrasi ialah para politisi yang menyalurkan hasrat politiknya dengan membentuk partai, dan kalangan *civil society* yang memilih berada di luar politik praktis namun bekerja memperkuat basis demokrasi di kalangan akar rumput (*grass root*). Kalangan politisi dan kalangan *civil society* meyakini demokrasi yang ada sebagai system terbaik untuk menata kehidupan berbangsa. Kekuatan-kekuatan Islam yang merupakan penerima manfaat (*beneficiary*) potensial dari keberhasilan gerakan reformasi tersebar di kedua kalangan ini.

⁴ *Loc. Cit.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 2

Sementara kelompok kontra demokrasi, adalah mereka tidak ikhlas, tidak menerima aturan main (*rule of the game*) demokrasi,⁶ --yang oleh elit politik dan elit Islam (ulama) yang pro demokrasi sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama.

Ungkapan pendapat di atas menegenai identitas politik dalam proses demokrasi menunjukkan bahwa efek dari proses demokrasi itu melahirkan *distingsi*, antara kelompok pro dan kelompok kontra demokrasi, yang berimplikasi juga pada ideologi agama (Islam) sebagai *narasi* dan *background dalih* dalam menafsirkan proses demokrasi, sehingga itu melahirkan apa yang oleh Noorhaidi Hasan, dkk. dinamakan “*narasi Islamisme dan identitas politik*.”⁷

Islamisme, sering disebut Islam politik, menurut Noorhaidi Hasan, dkk.:

Islamisme sebagai Islam politik dikonsepsikan terutama bukan sebagai gejala agama, tetapi lebi merupakan fenomena sosial-politik yang meibatkan sekelompok individu muslim yang aktif melakukan gerakan didasari ideology tertentu yang mereka yakini (*assumed shared ideology*)... dan unsur terpenting yang membedakan Islamisme dengan gejala sosial-politik lain terletak pada tiga hal: (1) *aktor* yang terlibat, (2) *aktivisme*, (3) *ideologi*. Aktor Islamisme adalah “sekelompok orang yang beragama Islam” dan identitas keagamaan –sebagai sumber perubahan sosial dalam proses ineraksi sosial--, lebih dari Islam itu sendiri, mengikat aktivitas dan keterlibatan individu-individu yang berkhidmat (dengan ajaran *jihad*) dalam Islamisme.⁸

Pendapat di atas memperlihatkan bahwa Islamisme merupakan proses dakwah yang dilakukan oleh kelompok radikalisme terorisme atau disebut juga kelompok *jihadis*, sebab bagi mereka *jihad* merupakan keyakinan agama (doktrin *Islamisme*). Mereka dalam berdakwah untuk memberikan peneguhan bagi

⁶ *Ibid.*

⁷ Uraian lengkap lihat Noorhaidi Hasan, dkk., *Instrumen Penelitian Narasi dan Politik Identitas Pola Penerimaan dan Penyebaran Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta-Jakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga dan BNPT, 2013), hlm. 8-18.

⁸ *Ibid.*, hlm. 8-9.

kelompok Islam, yang diidentifikasi sebagai kelompok Islam yang eksklusif, salafi, fundamentalis, dan kontra demokrasi yang memiliki pandangan dan cita-cita ideologi Islam tersendiri yang dianggapnya paling benar dan kepada kelompok yang lain yang berbeda dipandang sebagai musuh (*Islam eksklusivisme*). Namun, pada hakekatnya proses dakwah menurut Q.S. Ali Imran ayat 104 dan 110 bahwa dakwah ditujukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* atas dasar iman. Tujuan dakwah demikian, sejalan dengan pendapat Syaikh Ali Mahfuzh, dakwah diartikan “dorongan manusia pada kebaikan (*al-khair*), petunjuk (*al-huda*), serta menyuruh berbuat baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah dari kejahatan (*hani munkar*) supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akherat.”⁹

Oleh sebab itu, kita harus mengenal identitas Islam dalam berdakwah, antara dakwah yang dilakukan oleh kelompok Islam moderat dengan penyebaran Islamisme (Islam ideologi) oleh kelompok Jihadis (kelompok Islam ideologis). Menurut Noorhaidi Hasan, dkk., bahwa *identitas keagamaan* tidak cukup untuk menisbatkan sesuatu kepada Islamisme, tetapi memerlukan *aktivisme*, di mana gerakan atau aktivitas keagamaan yang bernuansa ideologis-politis memiliki spektrum yang sangat luas yang erat kaitan dengan sistem kekuasaan. Ideologi berfungsi sebagai penggerak dan landasan pemikiran atau gagasan di belakang aktivitas dikategorikan sebagai *Islamisme*.¹⁰

Kelompok Islam ideologis tersebut, meyakini bahwa Islam ditegaskan bukan sekedar agama, tetapi juga ideologi politik, untuk membangun negara Islam, atau setidaknya masyarakat muslim yang taat syari'ah,¹¹ yang dimaknai secara formalisme/ideologis, sebagai sistem demokrasi yang dibangun oleh kelompok Islam salafi/kelompok Islam eksklusif.

Kelompok ini juga terkatagorisasi: (1) mereka memandang demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang

⁹ Syaikh Ali Mahfuzh, *Bidayatul Mursyidin*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1965), h. 17

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*

bertentangan dengan demokrasi; (2) mereka merampas kebebasan; (3) mereka menentang demokrasi dengan sarana-sarana yang justeru disediakan oleh ruang demokrasi yaitu ruang publik dan bebas; (4) mereka menyalurkan dengan kekuatan politik yang juga berada di dalam barisan ini.¹² Mereka berusaha menghidupkan kembali *faham Islam salafi*, atau *re-Islamization* (menurut Gilles Kepel), atau istilah menurut Emmanuel Siven yaitu *radical Islam* (Islam radikal),¹³ yang menginginkan perubahan secara mendasar dan cepat berhasil.

Saat ini di Indonesia, yang juga membias ke wilayah Lampung, terdapat dua gerakan Islam radikal, yang menarasikan Islamisme, yaitu:

1. Gerakan Islam radikal yang bersifat terbuka dan cair (*loosely organization*); dan ini operasionalnya mudah dikenali dari sisi pelaku dan organisasi gerbong gerakannya; bahkan rekrutmen keanggotaannya diselenggarakan secara terbuka. Kelompok gerakan ini, berasal dari dalam negeri seperti lascar Jihad Forum Komunikasi ahlu sunnah wal Jama'ah (LJ-FKAWJ), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan beberapa kelompok kecil militant yang lebih kecil seperti: Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Hizbullah, dan Jundullah; dan kelompok-kelompok lainnya yang berafiliasi dengan jaringan Islam luar negeri dari Timuer Tengah seperti Jama'ah Ikhwanul Muslimin yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan HTI yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir di Yordania.
2. Gerakan Islam radikal yang bersifat tertutup, yang kerap disebut sebagai organisasi bawah tanah (*underground organization*) karena gerakan ini sulit diidentifikasi, proses rekrutmen keanggotaannya juga secara rahasia, rapi, sistematis, dan memakai sistem stel-sel. Kelompok organisasi ini antara lain: Jamaah Islamiyah (JI) bertujuan memaparkan negara Islam atau sistem khilafah melalui

¹² Ridwan dan Ahmad Gaus, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3

jihad, dengan tokohnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir di mana JI dibentuk tahun 1993.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa proses demokrasi di tengah mayoritas penduduk beragama Islam, di mana agama mewarnai proses demokrasi, kemudian melahirkan Islamisme yang dimaknai sebagai Islam politik atau Islam ideologi, untuk membedakan dengan Islam yang diyakini oleh kelompok Islam moderat, di mana kelompok ini tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara, tetapi lebih pada substansialisme memperkuat demokrasi negara.

Secara singkat dapat dipetakan menjadi dua kelompok Islam di Indonesia, yang juga berhubungan dengan pemetaan Islam di wilayah Lampung, yaitu: (1) kelompok Islam salafi, Islam radikal, Islam fundamentalis, atau kelompok Islam penolak atau kontra demokrasi, antara lain: LJ-FKAWJ, MMI, FPI, JAMI, HTI, FPIS, Hizbullah, Jundullah, dan JI, bahkan juga kelompok Islam radikal lain yang digolongkan berorientasi pada politik trans-nasional seperti: JAMI yang disebut Gerakan Tarbiyah di mana gerakan ini, termasuk JI beroperasi di kampus-kampus melali Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di perguruan tinggi umum dan PTAI, bahkan Rohis siswa SLTA. Selain JAMI, juga gerakan bercorak Wahabi-Saudi yang ditengrai mengupayakan Wahabisasi global. Bahkan, belakangan gerakan kelompok salafi telah berupaya menanamkan ideologi mereka di masjid-masjid yang secara umum berada dalam pengawasan NU dan Muhammadiyah sebagai kelompok pro demokrasi dan Islam moderat.¹⁵

Dengan demikian, pada hakekatnya manusia tidak melepaskan kebutuhannya dari nilai agama dan nilai politik. Namun, pada dataran interaksi sosial untuk mencapai tujuan itu, ada perbedaan arah, pola aktivitas, dan tujuan sehingga terjadi persinggungan sosial, yang berimplikasi pada ketimpangan sosial serta kesenjangan sosial, lebih dikembangkan pada interaksi yang mengarah pada konflik sosial. Muncullah jargon-jargon sosial: ketidakadilan sebagai lawan keadilan, kediktatoran sebagai lawan keaspirasian, kekufuran sebagai lawan kesalehan, kejahatan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

sebagai lawan kebaikan, radikalisme sebagai lawan moderatisme, terorisme sebagai lawan perdamaian, dan sebagainya. Dari kalangan agama, melahirkan pro dan kontra produktif tentang *demokrasi* dan *ajaran jihad*. Kelompok salafi dikenal juga sebagai “kelompok *jihadis*” memiliki pemikiran dan gagasan, sikap bahkan gerakan yang mengarah pada tindakan radikalisme dan terorisme. Berbeda dengan ajaran *jihad* yang dipahami dan diaplikasikan oleh kelompok muslim moderat. Ajaran *jihad* bukan ajaran yang berakibat pada hilangnya rahmat, tetapi mengapa kelompok Islam radikalis justru memaknai jihad dan implementasinya dalam gerakan Islamisme melahirkan laknat yang berakibat pada kerugian bagi komunitas muslim sendiri, kepentingan umum dan fasilitas umum, bahkan itu membuat pencitraan buruk di mata dunia Internasional, sehingga ada “komunitas bangsa” (*nation-community*) seperti Amerika Serikat menjangonkan bahwa “*Islam agama teroris*”.

Fenomena demikian, menunjukkan nuansa aktivisme-politik dan aktivisme-agama yang saling bersinggungan, melahirkan hubungan yang antagonistik, hingga melahirkan konflik sosial di antar dua kelompok tersebut, yaitu kelompok radikal dan teroris dengan kelompok yang anti radikal dan teoris, baik dari unsur pemerintah (kelompok politisi) maupun unsur masyarakat agamis (khususnya: kelompok muslim moderat sebagai kelompok *civil society*). Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia juga pengaruhnya terjadi di wilayah Lampung, sebagai bagian dari NKRI.

Wilayah Lampung, memiliki luas wilayah seluas 35.376,50 kilometer persegi dihuni oleh penduduk berjumlah lebih dari 8 juta jiwa, dengan penduduk mayoritas beragama Islam terpolakan pada tiga kelompok keagamaan, yaitu: Pertama, *kelompok Islam moderat* seperti NU, Muhammadiyah, Jam’iyatul Al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Persis, Perti, PUI, Ittihadul Muballighin, dan lainnya yang tergolong pro demokrasi. Kedua, *kelompok Islam radikal*, yang diidentifikasi memiliki pemikiran atau gagasan bahkan tindakan radikal seperti: FPI, HTI, Khilafatul Muslimin, dan LDK-LDK yang di bawah binaan HTI tetapi tidak sepenuhnya menerima narasi Islamisme yang disebarkan oleh HTI seperti LDK Unila dan LDK IAIN serta LDK STIMIK Teknokrat

yang kemudian lebih cenderung ke arah Islam yang moderat. Ketiga, *kelompok Islam sesat*, ini disinyalir seperti kelompok kecil penganut paham Syi'ah dan Ahmadiyah, serta LDII yang kemudian mengubah paradigam keagamaan pada pemahaman dan sikap yang lebih mengarah pada kelompok Islam moderat. Namun demikian, terdapat kelompok-kelompok lainnya, yang tergolong moderat seperti GMI, Paku Banten, GP. Ansor, Rohis (siswa SLTA), Risma/pemuda Islam, dan kalangan khatib, da'i serta takmir masjid secara umum juga tergolong kelompok moderat. Adapun secara personal, ada dijumpai ustad/da'i yang memiliki pemikiran radikal, tetapi tidak setuju dengan gerakan radikalisme dan terorisme. Selain itu, terdapat pesantren yang diidentifikasi memiliki jaringan dengan gerakan bercorak dan mengupayakan Wahabisasi global seperti Pesantren Ulul Albab, Pesantren Al-Mujtama' dan Pesantren Darul Fattah mendapat bantuan dana dari Saudi Arabia atau LIPIA. Namun demikian, secara umum bahwa pesantren-pesantren dan LDK-LDK, serta Rohis-Rohis di Sekolah masih terkatagorisasi kelompok Islam moderat.

Secara umum, narasi Islamisme dalam artian penerimaan dan penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh kelompok salafi di Lampung merupakan respon dari proses demokrasi pasca reformasi yang dihadapkan pada kepentingan ideologi politik yang pro demokrasi dan kontra demokrasi. Kemudian, bagaimana upaya-upaya kelompok salafi dalam menyebarkan narasi Islamisme di tengah masyarakat, baik dari segi operasional, taktikal ataupun strategiknya? Lalu, bagaimana identitas politik yang dibangun oleh kelompok salafi? bagaimana konstruksi yang dikembangkan melalui media, ruang gerak, bentuk aksi, dan relasi untuk penyebaran dan penerimaan radikisme dan terorisme di tengah masyarakat Lampung untuk mewujudkan demokrasi dengan sistem khilafah, bukan demokrasi Pancasila? Itulah beberapa pertanyaan yang melatarbelakangi permasalahan untuk dirumuskan.

B. Kerangka Konseptual

1. Islamisme

Islamisme, berasal dari kata Islam dan isme. Islam yang

merujuk pada sumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah agama Wahyu Allah yang dibawakan oleh Rasul Muhammad SAW untuk didakwahkan kepada umatnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Namun dalam sejarah perkembangan Islam, aspek politik yang mempengaruhi sistem kehidupan umat Islam, berbeda dengan politik yang dipraktikkan oleh Rasul Muhammad untuk memperkuat Islam dalam mewujudkan rahmat bagi semesta alam. Perkembangan Islam pada era komtemporer, bahkan pasca reformasi di Indonesia semakin jelas ke permukaan bahwa Islam dikonfigurasi dalam tataran ideologi-politik bagi kelompok Islam radikal atau kelompok Islam salafi yang menginginkan negara harus berdasarkan syari'at Islam dalam system khilafah dengan bentuk negara Islam.

Di Indonesia, kelompok Islam radikal atau kelompok Islam salafi tidak setuju dengan bentuk NKRI dan system demokrasi Pancasila; dan itu harus dikembalikan kepada sistem demokrasi dan sistem kebharaan pada masa lampau, sehingga Islam harus diwujudkan dalam bentuk Islam politik ataupun Islam ideologi, yang diartikan Islamisme. Menurut Noorhaidi Hasan, dkk. "Islamisme, atau sering juga disebut Islam politik, dikonsepsikan terutama bukan sebagai gejala agama, tetapi lebih merupakan fenomena sosial-politik yang melibatkan sekelompok atau individu muslim yang aktif melakukan gerakan ideologi tertentu yang mereka yakini."¹⁶

Dari pengertian Islamisme tersebut dipahami, bahwa Islamisme berbeda dengan Islam. *Islam*, adalah agama yang *rahmatan lil-'alamin*, bukan agama yang berideologi-politik, yang penganutnya tidak bertujuan untuk mendirikan negara khilafah, tidak melakukan tindakan radikalisme dan terorisme karen berakibat pada mafsadat bagi kehidupan bangsa, negara, dan agama. Islam demikian biasanya dianut oleh kelompok Islam moderat yang pro demokrasi Indonesia dan menerima bentuk NKRI. Kelompok ini berkeyakinan bahwa demokrasi Indonesia sebagai system terbaik dalam menata kehidupan berbangsa dan

¹⁶ Noorhaidi Hasan, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 8

bernegara,¹⁷ dan mendirikan negara di atas negara dipandang sebagai *bughat* yang haram dilakukan oleh umat Islam.

Namun sebaliknya, *Islamisme* dipahami sebagai Islam politik, Islam ideologi, di mana formalism Islam menjadi ideologi suatu negara dengan sistem khilafah dalam bentuk negara Islam; dan kelompok ini dinamakan kelompok Islam radikal atau kelompok Islam salafi sebagai kelompok yang kontra demokrasi, NKRI, dan Pancasila dalam sistem politik kenegaraan untuk menata kehidupan berbangsa.

Jadi, istilah *Islamisme* lebih pada Islam ideologi-politik, berbeda dengan *Islam* sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam; sehingga *Islamisme* lebih merupakan fenomena sosial-politik bagi penganutnya secara kelompok dan individual. Namun demikian, yang terpenting membedakan *Islamisme* dengan fenomena politik, menurut Noorhaidi Hasa, terletak pada tiga hal: (1) *aktor*, (2) *aktivisme*, (3) *ideologi*, yang dilembagakan oleh aktor.¹⁸ Kemudian, identitas keagamaan (*Islamisme*) dijadikan sumber makna dan sumber perubahan yang dibangun oleh kelompok ataupun individu (aktor: kelompok Islam radikal) dalam proses interaksi sosial yang berkhidmat (*doktrin jihad*) dalam *Islamisme*, sehingga dikenal dengan *kelompok jihadis*.

2. Politik Identitas

Islamisme membutuhkan proses interaksi sosial dalam melembagakan Islam politik sebagai identitas keagamaan yang membutuhkan pula aktivisme Islam bagi aktornya sehingga *Islamisme* berkembang dan dapat dikembangkan dalam situasi perubahan struktural dan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, kondisi sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan.

Mereka, yang secara ekonomi kurang menguntungkan, miskin, dapat direkrut dengan memberikan harapan baru bagi yang mengalami frustrasi. Mereka membangun *social ineterst* dalam situasi perang atau konflik sosial ataupun situasi yang tidak menguntungkan, dan berakibat lahirnya *distingsi* antara

¹⁷ Ridwan dan Ahmad Gaus, *Op. Cit.*, hlm. 2-3

¹⁸ Noorhaidi Hasa, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 8

kelompok *ingroup love* (solidaritas/senasib) dan kelompok di luar mereka (*outgroup bate*) ialah kelompok yang dibenci/dimusuhi oleh mereka,¹⁹ dan disinilah lahirnya identitas sosial semacam “*minna*” wa “*minhum*” yakni *insider* dan *outsider*.

Identitas sosial bersifat kelompok dan individual (sebagai bagian dalam kelompok yakni sekelompok individu), di mana *Islamisme* dikonsepsikan menjadi manifestasi politik identitas. Dalam konteks ini, *Islamisme* merupakan cara yang ditempuh oleh sekelompok individu untuk melakukan strategi ketika mereka dihadapkan dengan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya yang tidak menguntungkan, sehingga mereka melakukan eksploitasi simbol-simbol dan sentiment primordial. Penekanan gaya hidup yang berbeda di kalangan Islamis pada saat identitas mereka terguncang oleh pusaran dan perubahan, dan ini yang membentuk mereka sebagai *kelompok Islamis eksklusif*.

Kelompok Islamis eksklusif membangun konflik sosial dalam interaksi sosial terhadap tatanan yang bersifat hegemoni-global untuk menarik garis perbedaan yang tegas, antara Islam dan kapitalisme ataupun paham-paham deologis besar lainnya. Mereka sengaja menciptakan promodialisme, eksklusivise, dan konflik sosial sebagai bagian dari gerakan terorisme di Indonesia.

Menurut Anies R. Baswedan paling sedikit punya tiga lapis yaitu: (1) pada tingkat *operasional*, untuk menemukan pelaku teror (aktor), dan penjelasannya adalah penjelasan kultural-ideologis, pandangan keagamaan di tingkat tertentu seperti itu; (2) di tingkat atasnya, adalah *taktikal*, dan (3) begitu pula ditingkat statgiknya juga belum tahu.²⁰ Namun demikian, pada tingkat taktikal, mereka berusaha membangun solidaritas yang kemudian menampilkan organisasi/intitusi yang dijadikan gerbong lokomotif gerakan, semacam *instrumental ideas* bagi mereka, dan *startegik* untuk mesin operasinya.

Menurut Anies R. Baswedan kasus di Indonesia berbeda. Karena itu saya kira kita perlu mengambil sikap yang tegas

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12

²⁰ Anies R. Baswedan, “Terorisme dan Hak Asasi Manusia”, dalam *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 63.

terhadap terorisme. Publik harus diyakinkan, antara target operasi dan sasaran politik itu tidak nyambung. Tidak ada pula pihak yang bertanggung jawab, tidak seperti kelompok-kelompok teroris di luar negeri,²¹ seperti di Palestina misalnya Hamas, dan Iran adalah Mujahedin e-Khalq. Di Indonesia, pelaku teror sering kali menggunakan dalih-dalih keagamaan, terutama *jihad* sehingga pada pada tingkat operasional, doktrin jihad merupakan motivasi gerakan mereka dan mendorong individu terlibat, karena pemilihan strategik dibungkus dalam kemasan agama.²² Itulah sebagai politik identitas kelompok teroris untuk mengkonsolidasikan identitas di Indonesia. Jadi secara singkat dapat dipahami, bahwa *Islamisme* dikonsepsikan sebagai *manifestasi politik identitas*.

Manifestasi politik identitas terus dibangun secara distingtif, karena hegemoni itu dibangun juga melalui *narasi* (dimaknai sebagai: *wacana*, *cerita*, atau, *ajaran*), terutama yang ditunjukkan pada sistem sosial (umpulan sub-sub sistem kehidupan yang saling berkait): ekonomi, politik, budaya sekuler dan lainnya yang dianggap sebagai akar marjinalisasi yang menimpa sebgai kelompok masyarakat. Mereka melibatkan agensi sosial yang dapat dibentuk dari perorangan untuk melakukan aksi yang dapat membawa perubahan dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat (mengubah sistem sosial yang sudah mapan).

Membuat pilihan *agensi*, ungkap Bourdie dan Giddens yang dikutip oleh Noorhaidi Hasan, *tidak bersifat natural*, tetapi *hasil pemahaman dan kesadaran* dari *suatu keadaan* yang dihadapi, sehingga *lahir keputusan* untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaan tersebut. Bagi agensi tersebut, bahwa narasi merupakan sesuatu yang harus terus disebarakan untuk dapat diterima di tengah masyarakat.

3. Konstruksi Dakwah Islam (Narasi Islamisme)

Narasi (*narration*), diambil juga dari kata *narrative* (istilah menurut Haverson, Goodall dan Corman), diartikan sebagai “*gabungan cerita-cerita yang berbeda yang dikombinasikan secara koheren untuk mendukung satu tujuan atau ideology*”

²¹ *Ibid.*, hlm. 63-64.

²² *Ibid.*, hlm. 64.

*tertentu dengan memperhatikan emosi dan kondisi audiens:*²³ yakni sasaran, masyarakat, dan public sebagai sasaran dakwah kelompok jihadis.

Pengertian narasi itu menunjukkan ciri-ciri narasi: (1) narasi mengandung penjelasan tentang *situsai yang tidak diinginkan* dan *arahan cara mengatasi situasi itu*; (2) narasi bersifat ekstrim, ada distingsi, hubungan antagistik, *labeling* negatif antara pihak kawan dan lawan; (3) interaksi sosial mengarah pada konflik yang menuntut upaya eliminasi pihak lawan dengan berbagai cara, termasuk cara radikal & teror; dan (4) narasi erat dengan doktrin/ideologi.

Ideologi dapat dipahami sebagai sepeangkat nilai, konsep, teori, gagasan, pemikiran, dan doktrin agama untuk mewujudkan tujuan agar narasi dapat diterima oleh masyarakat walaupun tidak sepenuhnya dapat diterima tetapi perlu penyebarannya secara bertahap, berkesinambungan, dan membangun pola-pola penerimaan dan penyebarannya sehingga harus pula memperimbangan faktor-faktor yang dapat membawa pada perubahan dari penerimaan dan penyebaran narasi itu. Untuk itu, dibutuhkan konstruksi narasi.

Menurut Noorhaidi Hasan, karena kelompok radikal dan teroris selalu melakukan interaksi sosial dengan cara-cara kekerasan, maka narasi ekstrim pun mereka kembangkan dengan *pola narasi ekstrim* yaitu: (1) *membangun pemahaman pesan ekstrim*; (2) *memberi kesan bahwa kejadian itu skenario (musuh) yang bersifat universal dan global*; (3) *menciptakan kesan yang lazim sudah dipahami secara umum*; dan (4) *pengaruh pesan dari cerita itu mempersuasi seseorang untuk terlibat dalam aksi dari pembawa pesan.*²⁴

Proses interaksi sosial dalam menarasikan tujuan kelompok radikal dan teroris, juga dapat diamati dari konstruksi narasi dalam penelitian, sebab dalam konstruksi narasi penelitian berusaha memperketat konstruksi narasi yang ditemukan di lapangan yaitu:

- a. Narasi bermanfaat untuk menangkap kompleksitas

²³ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

penerimaan pengaruh radikalisme dan terorisme serta membongkar hubungan saling terkait, missal antara lanskap sosial-politik-keagamaan dengan mobilisasi Islamisme di berbagai lini masyarakat, sebab narasi lebih bersifat ideologis.

- b. Narasi merupakan tahap awal proses rekrutmen yang berpotensi pada proses ideologiasasi.
- c. Narasi bermakna strategi komunikasi untuk meyakinkan audens (komunikan) agar dapat diterima dengan mudah audiens menerima ideology tertentu.²⁵

Dengan konstruksi narasi itu, maka perlu dijelaskan *peta narasi* yang dikembangkan secara variatif, konstruktif, dan responsif untuk penyebaran narasi melalui media komunikasi *nirmassa* dan *media massa* cetak dan elektronik. Pemetaan narasi bertujuan untuk:

(1) menemukan sekumpulan cerita-cerita yang dirangkai guna mendeskripsikan dan melegitimasi pemahaman, sikap, dan tujuan politik atau ideologi tertentu; (2) memperhatikan emosi dan sentiment identitas lokal, yang disusun peneliti, (3) mengidentifikasi dinamika lokasi dan ideologi yang berkembang di masyarakat, dan (4) memudahkan pola penyebaran dan penerimaan narasi serta faktor apa yang mempengaruhi pola tersebut dalam gerakan radikalisme dan terorisme yang terjadi di masyarakat.²⁶

Pola penyebaran termasuk narasi Islamisme kelompok jihadis kepada masyarakat Lampung yaitu konstruk dakwan naratif yang terbagi dua yaitu:

(1) Pola Penyebaran dan Penerimaan Narasi

Pola dakwah merek adalah pola penyebaran narasi, dimaksudkan agar kajian terhadap narsi membuka peluang untuk memahami potensi pengaruh gerakan melalui pola yang lebih luas, luwes, dan dialogis, yang tidak mesti diterima secara rasional dalam mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam gerakan. Menurut Noorhaidi, dkk., bahwa:

Gerakan ideologis tidak selalu diawali oleh penerimaan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16-17.

mereka secara rasional terhadap sebuah ideologi gerakan. Misal, diawali dengan *cerita*, dan *diidentifikasi emosional* melalui cerita agar mereka memiliki keterikatan lebih dekat (*engage*) *dengan pembawa cerita* (aktor); lalu pembawa cerita juga dapat kesempatan untuk *menanamkan ideologi* secara bertahap, hingga mereka dapat *direkrut*, kemudian *masuk ke dalam kelompok radikal dan teroris* agar mereka terdorong dalam *proses pencarian keagamaan* yang memikat berdasarkan *sentiment-sentimen yang lekat dengan latar belakang mereka* (audiens) seperti: *etnisitas, ketidakadilan, dan viktimisasi umat Islam*.²⁷

Untuk itu, pola penyebaran narasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi transmisi Islamisme kepada informan: (a) *media komunikasi* (bulletin, selebaran, buku, majalah, koran, radio, televisi, internet); (b) *ruang/setting sosial*, seperti pengajian, halaqah, seminar, diskusi, pelatihan, dan lainnya di masjid/mushalla, pesantren, sekolah, perguruan tinggi, ormas/ormas Islam, dan lain-lain; (c) aksi-aksi, unjuk rasa, dan demonstrasi, seperti aksi kemanusiaan; dan (d) relasi interpersonal, seperti relasi keluarga, pertemanan, kemitraan bisnis, dan lainnya.²⁸

Pola-pola penyebaran narasi, pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat. Bahkan, membentuk jaringan untuk membangun kesepahaman dan kesadaran bersama dengan ikatan ideologi gerakan tersebut. Namun, narasi yang disebarkan belum tentu seutuhnya diterima di masyarakat, terutama oleh subjek penelitian (informan). Keberadaan subjek penelitian dalam *peta Islamisme* mengenai posisi gerakan mereka, penerimaan narasi secara bertahap. Dimulai dari menimbulkan kesadaran dari situasi/sistem yang kacau agar mereka menarik diri dari masyarakat terbuka. Lalu membangun pembedaan (*distingsi*): menolak, sentiment, menolak keadaan selama ini, hingga percaya untuk melakukan tindakan radikal untuk memperbaiki dunia yang kacau/tak menguntungkan.²⁹ Akhirnya, gerakan itu termobilisasi secara sistematis, terstruktur, bertahap, sehingga peneliti pun

²⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁸ *Ibid.*, hlm.17-18.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18

harus mengidentifikasi sampai di mana perubahan posisi informan dalam peta narasi.

(2) Faktor Penyebaran dan Penerimaan Narasi

Faktor dakwah Islam mereka, dalam artian factor penyebaran dan penerimaan narasi akan dianalisis pada tahap akhir penelitian. Sebab, Islamisme bekerja pada raung sosial yang dinamis, yang di dalamnya terdapat beragam masalah makro dan mikro yang terjadi di masyarakat. Untuk itu factor-faktor kunci penyebaran dan penerimaan narasi Islamisme dan identitas politik dalam gerakan radikalisme dan terorisme agar dipahami peneliti dalam mengamati subjek penelitian. Menurut Noorhaidi Hasan, dkk., bahwa faktor-faktor kunci penerimaan dan penyebaran narasi, antara lain:

- a. mengeksploitasi identitas dasar dan primordial, yang disebut politik identitas;
- b. penyebaran dan penerimaan ideologi radikal dan teroris ditentukan oleh aliansi dan frustrasi yang dialami oleh seseorang ketika kehilangan atau guncangan identitas dirinya;
- c. persoalan-persoalan struktural sebagai akibat kegagalan pemerintah memenuhi permintaan lapangan kerja dan memperbaiki standar kepentingan masyarakat;
- d. Kalangan muda (pelajar dan mahasiswa) perlu mendapat perhatian khusus, mereka rentan terhadap pengaruh ideology radikal dan teroris karena mereka berada dalam fase transisi, yakni pencarian dan pembentukan identitas, dan merasakan langsung perubahan sosial tampak dihadapan mereka boleh jadi tidak adil buat mereka.³⁰

Kelompok radikal dan teroris terutama merekrut keanggotaannya di kalangan pemuda dipandang efektif, baik di sekolah dan kampus maupun masyarakat umum, dengan system yang rapi, terorganisir, janji-janji surgawi, dan sistem jaringan sel. Diberitakan, pemuda Indonesia dikirim ke Afghanistan untuk mengikuti latihan militer dan terjun di medan jihad, dan diberi

³⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19.

pengetahuan agama dari faham-faham salafi jihadis.³¹ Menurut Sholehudin:

Sebenarnya radikalisme bukanlah satu-satunya sebab terorisme. Karena banyak aspek lain seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Namun, faktor yang paling dominan yakni radikalisme. Dengan demikian, radikalisme diartikan sebagai paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, perombakan suatu system tatanan di masyarakat sampai ke akar-akarnya dengan berbagai cara, dan bila perlu dengan cara-cara kekerasan. Baik radikalisme maupun terorisme menagndung unsur kekerasan. Namun, radikalisme tidak selalu berarti terorisme. Kendati begitu, hampir semua aksi terorisme dipengaruhi faham atau sikap keberagamaan yang radikal. Terorisme dibentuk melalui proses yang panjang. Berawal dari sikap intoleransi, kemudian menjadi sikap yang radikal, dan melalui proses yang sedemikian rupa hal itu bisa berujung pada tindakan terorisme... dan radikalisme dikenali dari dua cirri utamanya, yaitu: (1) adanya penerimaan tentang keabsahan menggunakan kekerasan untuk mencaai tujuannya. (2) penerimaan tentang perlunya perubahan menyeluruh pada ideology dan system sekuler yang berlaku menjadi ideologi dan sistem Islami.³²

Uraian di atas menunjukkan bahwa pola dakwah yang dilakukan oleh kelompok jihadis atau kelompok Islam ideologis dipengaruhi oleh berbagai factor dengan tujuan mendirikan negara Islam di Indonesia untuk menggantikan system kenegaraan dan ideologi Pancasila serta bentuk NKRI. Pola dakwah demikian yang disebarkan di Lampung dapat dilihat pada uraian berikut ini.

C. Dakwah Kelompok Jihadis dalam Penyebaran dan Penerimaan Islamisme di Lampung

1. Sejarah Singkat Lampung

Wilayah Lampung, pada masa pra dan pasca kemerdekaan

³¹ Hanifuddin Mahfuds dan L. Hadi Pranoto, "Pelatihan Anti Radikal Terorisme Bagi Pengurus FKPT 10 Propinsi Wilayah Barat dan Tengah", *Jurnal BNPT*, Jakarta, Juni 2013, hlm. 24.

³² *Ibid.*, hlm. 25-26.

merupakan bagian dari karesidenan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1964 berdiri sendiri sebagai Provinsi Lampung. Secara demografis, Penduduk Lampung, berdasarkan data BPS 2010, sebanyak 7.608.405 jiwa tersebar di 15 kabupaten/kota dengan luas wilayah 35.376,50 kilometer persegi. Penduduknya berasal dari asli Lampung (25%), dan pendatang dari etnis Jawa (45%), dan etnis-etnis lainnya (30%) antara lain: Bali, Sumatera Barat, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, Bengkulu, Palembang, Sumatera Utara, dan Madura.

Luas wilayah Provinsi Lampung dihuni oleh penduduknya berjumlah total sebanyak 7.608.405 jiwa tersebar di 15 kabupaten/kota. Dari total penduduk itu mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 1.955.225 jiwa (25,70 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 5.653.180 jiwa (74,30 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 1,91 persen di Kota Metro hingga yang tertinggi sebesar 15,39 persen di Kabupaten Lampung Tengah.³³

Provinsi Lampung terbagi atas 15 kabupaten/kota yaitu: dua Kota (Bandar Lampung dan Metro), dan 13 Kabupaten (Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Mesuji, dan Kabupaten Pesisir Barat (sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat).

2. Karakteristik Sosial-Politik

Adat masyarakat Lampung berasal dari *Pepadun* dan *Saibatin*. *Adat Saibatin* merupakan pewaris para bangsawan di kalangan mereka, disebut *punyimbang*. Para *punyimbang adat*, mulai dari keluarga (yang kecil) sampai kerabat besar (*buai*, *suku*, *tiuh*, dan *marga*) mempunyai pemimpin menurut garis keturunan laki-laki (*patrilineal*). Tanpa ada *punyimbang*, kerabat masyarakat adat akan buyar, karena tidak ada tempat pemusatan kekuasaan keluarga/kerabat, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang

³³<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=18&wilayah=Lampung>, 20 September 2013, pukul 15:30

”dituakan” dalam *prowatin adat* untuk menyelesaikan persoalan kekerabatan pada umumnya. Sistem pemerintahan marga dikepalai seorang *punyimbang* bergelar *pasirah*, yang berasal dari *Adat Saibatin*.³⁴

Berdasarkan adat masyarakat, terpolakan pula sistem politik dan hukum masyarakat Lampung yang bersebdikan nilai adat, nilai agama, dan nilai nasionalisme. Oleh karena itu, karakteristik sosial-politik bagi masyarakat Lampung memiliki tiga karakteristik yaitu: (1) menganut sistem politik nasional/kenegaraan yang berlaku di Indonesia, seperti masyarakat memberikan aspirasi dan hak politiknya pada pilpres, pilgub, pilkada, dan pilleg; (2) sistem politik-adat seperti pemilihan dan pengangkatan kepala adat, pemberian gelar adat, dan upacara adat yang terkait dengan pemberian jabatan atau gelar adat yaitu *bejuluk adok*; dan (3) sistem politik dalam kepemimpinan non formal seperti jabatan-jabatan dalam kepengurusan ormas Islam, terkait dengan sebutan ketua, kiyai, buya, dan sebagainya; ormas kepemudaan dan lainnya.

Adapun masyarakat Lampung secara umum menganut sistem hukum yang meliputi hukum nasional/negara, hukum agama (Islam di antaranya), dan hukum adat Lampung. Ketiga hukum tersebut masih berlaku bagi masyarakat Lampung.³⁵

3. Karakteristik Sosial-Keagamaan

Penduduk Lampung mayoritas muslim, dan masyarakat asli Lampung identik dengan muslim. Di samping itu,

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 140.

³⁵ Abi Kusno, Abdul Syukur, dan Zainuri, *Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Lampung dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial-Keagamaan*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2000). Penelitian ini dilakukan di dua desa yang memiliki karakteristik desa berbeda: masyarakat Desa Negeri Katon adalah mayoritas penduduk asli Lampung dan masyarakat Desa Lumbirejo yang mayoritas berasal dari etnis Jawa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi transformasi budaya antara adat Lampung dan adat Pendatang yang terjadi secara akulturasi untuk mempertahankan kebudayaan masyarakat yang dihadapkan dengan arus perubahan global, dan nilai adat tersebut berhubungan dengan hukum yang masih dipegang oleh masyarakat Lampung yaitu hukum negara, agama, dan adat.

penganut agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hucu . Kelompok Islam, antara lain: warga NU yang terbesar pengikutnya, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lain seperti Al-Washliyah, Perti, PUI, Mathlaul Anwar, Persis, LDII, HTI, Khilafatul Muslimin, Ahmadiyah, dan Syi'ah. Karakteristik keagamaan (Islam) masyarakat Lampung, terpetakan menjadi tiga: *kelompok moderat* seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya; *kelompok salafi* yang bercita-cita mendirikan khilafah seperti HTI dan Khilafatul Muslimin, dan *kelompok sesat* seperti Ahmadiyah, Syi'ah, dan LDII yang kemudian ajarannya lunak dan mulai membuka diri kepada kelompok moderat untuk menghilangkan *steroatif* kelompok sesat, dan LDII melakukan perubahan paradigma dalam memahami ajarannya untuk menjadi moderat.

Menurut Sutomo, tokoh LDII Lampung, dalam wawancaranya mengatakan “memang ada kesan LDII menutup diri, najis kalau orang muslim selain pengikut LDII melakukan shalat di masjid LDII; tetapi sekarang sudah tidak demikian, sebab ajaran LDII sudah moderat supaya dapat bertahan dan dalam upaya penyebaran ajaran LDII kepada masyarakat Islam.”³⁶

Mengenai Ahmadiyah secara umum dipandang sebgagai ajaran sesat, faham yang sesat mengatasnamakan bagian dari ajaran Islam. Jika sesat, supaya pemerintah menertibkan; termasuk Khilafatul Muslimin jika meresahkan masyarakat dan memicu akan terjadinya konflik sosial supaya pemerintah bertindak tegas. Sebab semacam ada pembiaran pemerintah terhadap aktivitas Ahmadiyah dan Khilafatul Muslimin yang memiliki kantor di daerah Teluk.³⁷

Khairil Fajri, aktivis dan pengurus HTI Lampung, mengatakan bahwa cita-cita berdirinya system khilafah dan tegaknya syari'at Islam merupakan bentuk ideal bagi umat Islam untuk bersatu dan mengajak umat untuk mengamalkan system

³⁶ Sutomo, Tokoh dan Sekretaris LDII Provinsi Lampung, Wawancara tanggal 10 Juli 2013.

³⁷ Komentar penanya/peserta dari utusan LDII, NU, Muhammadiyah dalam acara *Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Organisasi Keagamaan Kota Bandar Lampung, yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, di Pondok Rimbawan Bandar Lampung, tanggal 13 Mei 2013.*

hukum yang dikehendaki dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, bukan sistem hukum yang menjauhkan diri umat Islam yaitu sekularisme. Oleh karenanya, kita harus terus berdakwah yang keberhasilannya mungkin terwujud dalam jangka waktu panjang.³⁸ HTI yang dikenal sebagai pengusung penegakkan sistem khilafah dan terlaksananya syari'at Islam terus menyuarakan gagasan-gagasannya dalam ajaran HTI melalui diskusi, *liqo*, seminar, bahkan aksi ke jalan terutana ketika ada event yang terkesan menyimpang dari ajaran syari'at seperti pada akhir-akhir ini HTI menolak diadakan *miss-world* di Indonesia dipandanginya sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan (muslimah) di Indonesia. Menurut A. Maftuh Abegebriel, dkk. Bahwa NII merupakan jelmaan DI/TII, kini bermetamorfose menjadi: MMI, FPI, HTI, FKAWJ (Forum Komunikasi Aswaja), FPIS, Hisbullah Sunan Bonang, dan Laskah Jundullah. HTI di Lampung juga bagian dari perwakilan HTI pusat memiliki visi dan misionis serta program dakwah yang ditujukan pada berdirinya daulah khilafah dan syari'at Islam.

Selanjutnya Maftuh Abegebriel, dkk menjelaskan, tahun 1980, DI memunculkan berbagai faksi baru di Indonesia: Atjeng Kurnia (Bogor, Serang, Purwakarta, Subang), **Ajengan Masduki** (Cianjur, Purwokerto, Jakarta, **Lampung**), Abdul Fattah Wiranagapati (Garut, Bandung, Surabaya, Kalimantan), Abdullah Sungkar (Jateng & DIY), Ali Hate (Sulsel), dan Syekh Panji Gumilang (mantan pimpinan Pesantren Az-Zaitun). Bahkan di Lampung, penyebaran Islam berpaham wahabisasi salafi melalui pesantren yang memiliki jaringan dengan pesantren Ngruki Solo, dan juga Khilafatul Muslimin; serta bantuan pembangunan masjid yang dilakukan oleh Yayasan Mekkah al-Mukaromah, Namun, banguna jejaring tersebut tidak sampai ke permukaan masyarakat melakukan tindakan yang radikal.

³⁸ Khairil Fajri, Wawancara pada tanggal 28 Juni 2013, dalam acara *Peran Intelektual dalam Membangun Peradaban Islam*, bertempat di Wisma Haji Islamic Center Rajabasa, Bandar Lampung. Pendapat Kahiril Fajri senada dengan H. Dwi Condro Triono, Ph.D, pengurus HTI Pusat, sebagai narasumber ia menegaskan umat Islam harus mengubah system ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi syari'ah supaya umat Islam tidak terjerat pada dosa sosial dan kemungkaran sosial supaya anak dan keturunan kita tidak mendarahdaging dalam riba.

Adapun kejadian tindakan radikal seperti yang terjadi di Tanggamus perampokan di bank (BRI) yang disinyalir dilakukan oleh kelompok radikal dari luar Lampung, adalah suatu *jaringan personal-terselebung*. Tidaklah teridentifikasi mereka memiliki hubungan dengan pesantren, seperti Pesantren Ulul Albab di Sukarame, Yayasan Mekkah al-Mukaromah, HTI, dan Khilafatul Muslimin di Lampung. Dengan demikian, kelompok teroris yang merampok di Lampung adalah mereka bersinggah di Lampung, mungkin secara personal ada jaringan terselebung, yang hasil rampokan mereka terkait dengan jaringan kelompok teroris di luar Lampung. Diberitakan, bahwa: "Polisi buru satu lagi terduga teroris di Lampung, anggota Densus 88 menyisir lokasi penangkapan teroris. Densus 88 masih mencari pelaku tersebut setelah sebelumnya menangkap empat tersangka lainnya."³⁹

Berikut ini, diturunkan berita tindakan teroris yang terjadi di Lampung, sebagai berikut:

Lima Teroris Ditembak Mati di Lampung. *Antara News* memberitakan bahwa Detasemen Khusus 88 Mabes Polri masih memburu satu tersangka yang diduga pelaku terorisme di Lampung yang diduga berperan mencari dana untuk membiayai kegiatan terlarang tersebut. "Densus 88 masih mencari pelaku tersebut setelah sebelumnya menangkap empat tersangka lainnya," kata Kapolresta Bandar Lampung Kombes M Nurrochman, saat dikonfirmasi di Bandar Lampung, Sabtu. Kapolres Bandar Lampung Kombes Nurrochman menjelaskan lima orang yang diduga tersangka terorisme tersebut berperan menggalang dana untuk melakukan aksi terorisme di Poso dan Jawa Tengah.

"Mereka menganut *paham Baha`i* yang mana mereka memiliki kepercayaan boleh mencuri dan merampok demi tujuan perjuangan mereka," katanya. Salah satu cara pengumpulan dana itu menurut Kombes Nurrochman, dengan melakukan perampokan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Tanggamus senilai Rp500 juta yang dilakukan beberapa waktu lalu. "Uang hasil rampokan itu mereka kirim ke Poso dan Jawa Tengah," ujar dia. Agama larang pencurian. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia

³⁹ Akbar Nugroho Gumay, memberitakan dalam *Antara* bahwa peristiwa teroris di Lampung pada Sabtu, 11 Mei 2013 07:26 WIB.

(MUI) Provinsi Lampung, Mawardi menegaskan, bahwa tidak ada satu agama pun membenarkan melakukan pencurian sekecil apa pun untuk kepentingan apa pun. “Tidak ada satu agama yang menghalalkan mencuri untuk tujuan tertentu, apalagi sampai untuk melakukan aksi terorisme,” katanya. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan doktrin sesat atas nama agama yang justru menjerumuskan seseorang melakukan hal tidak benar.

Tim Densus 88 telah menggerek salah satu diduga tersangka teroris di Jalan Pulau Sari Nomor 25 Kecamatan Way Kandis. Tersangka berinisial S saat dilakukan penggerebekan sudah tidak ada di lokasi, dan yang tersisa buku bacaan tentang jihad. Menurut keterangan warga sekitarnya, S bersama istrinya tidak terbuka dengan warga sekitar. Dia dan keluarganya telah mengontrak di kelurahan tersebut sekitar satu tahun. S bekerja di bidang percetakan. Warga sekitar menyebutkan tersangka dan istrinya sangat tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar.⁴⁰

Data di atas menunjukkan bahwa pelaku terorisme bukanlah warga masyarakat Lampung, tetapi warga luar yang mengontrak di Lampung, tepatnya di sekitar Way Kandis, Kota Bandar Lampung. Bahkan, mereka hanya melakukan perampokan di BRI Tanggamus, kemudian hasil rampokan dibawa ke luar Lampung untuk mendanai aksi teror di Poso dan Jawa Tengah.

4. Kinfigurasi Sosial-Budaya

Masyarakat Lampung menganut budaya *Piil Pesanggiri*, yang paling substansial adalah mereka mempunyai perasaan malu melakukan pekerjaan hina, kejahatan, maksiat, yang bertentangan dengan Islam; memiliki harga diri, dan menjalin persaudaraan disebut *Budaya Muakhi* sesuai ajaran Islam. Budaya *Piil Pesanggiri* memiliki nilai-nilai adat yang Islami, yaitu:

- a. *Juluk-adok* (pemberian gelar: mempunyai kepribadian sesuai gelar adat yang disandangnya); yakni seseorang saat diberi amanah harus mampu mencerminkan sikap/akhlaq terpuji, apapun kedudukan dia;

⁴⁰ Tasrief Tarmizi (ed.), “Lima Teroris Ditembak Mati di Lampung”, *Antara News*, Sabtu, 11 Mei 2013, 07:17 WIB (EM*A054/a011).

- b. *Nemui-Nyimah* (saling berkunjung/*silaturahmi*, dan ramah menerima tamu);
- c. *Nengah Nyampur* (aktif bergaul di masyarakat, tidak individualistis).
- d. *Sakai-Sambaian* (gotong royong, saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya).⁴¹

Adat budaya yang dibawa oleh pendatang, juga masih dilestarikan di Lampung, dan tetap diterima oleh masyarakat asli Lampung yang sangat akomodatif dengan budaya luar. Konfigurasi budaya Lampung merepresentasikan suatu produk budaya asli Lampung yang sangat akomodatif dalam akulturasi budaya dengan budaya luar masyarakat Lampung. Selain itu, konfigurasi budaya menunjukkan keragaman budaya yang memperkaya budaya Lampung, di mana budaya asli dan budaya luar yang masing-masing dipertahankan dapat hidup berdampingan bagi masyarakat Lampung yang pluralistik dari unsur budaya, etnis, bahasa, dan agama.

Menurut Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin, MS bahwa budaya *muakhi* mengandung filosofi “membangun persaudaraan dan persatuan” tanpa memaanang perbedaan etnis dan budaya lain, untuk menjaga dan mempertahankan kesatuan dan persatuan masyarakat dan negara. Lampung merupakan gerbang masuknya orang-orang dari Jawa ke Sumatera, dan orang-orang Sumatera ke luar Jawa.⁴² Bahkan ungkap Dr. Bunyana Solihin, MA bahwa Lampung merupakan miniature Indonesia, yang sangat terbuka menerima siapa saja dan darimana pun datangnya orang-orang dari luar ke Lampung. Keterbukaan masyarakat Lampung sangat menghormati tamu, kemudian korang kontrolnya aparat desa atau masyarakat lingkungan menimbulkan kelompok teroris dapat masuk ke Lampung dan melakukan tindakan kejahatan seperti peramokan di BRI Tanggamus.⁴³

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*

⁴² A. Fauzie Nurdin, Tokoh Adat Lampung Pepadun, Wawancara tanggal 2 Juli 2013

⁴³ Bunyana Solihin, Tokoh Adat Lampung Saibatin, Wawancara tanggal 3 Juli 2013

Begitu pula menurut K.H. Arif Mahya, bahwa masyarakat Lampung yang sangat agamis senang kedatangan tamu dan sangat menghormati tamu, itu merupakan silaturahmi yang mendatangkan pahala dan eberkahan. Namun demikian, menjadi dsalahgunakan oleh orang-orang memanfaatkan situasi dan kondisitersebut untuk tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik Lampung seperti akhir-akhir ini yang telah dlakukan oleh elompok teroris. Di sinilah peran tokoh agama, aparat pemerintah, dan tentara TNI) bersama masyarakat untuk bersama-sama mencegah tindakan kejahatan, terror dan kemungkaran yang tidak mencerminkan budaya masyaakat dan bangsa serta bukan tindakan uat Islam yang baik.⁴⁴

Oleh sebab itu, nilai-nilai budaya *Piil Pesanggiri* dan *muakhi* adalah mencerminkan budaya masyarakat Lampung yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan, gotong royong, silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, keterbukaan budaya tersebut yang sangat akomodatif dengan budaya luar yang beragam hidup di Lampung memperlihatkan kebhinekaan-tunggal ika sebagai cerminan budayaa bangsa yang harus dipertahankansebagai bagian dari salah satu empat pilar kebangsaan dalam kondisi apapun di Lampung. Seperti, terjadinya gerakan radikal dan tindakan teror di daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Lampung harus diantisipasi dengan pendekatan budaya yakni nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dan agama (Islam) dapat bersinergis dengan baik. Hal demikian yang menjadika masyarakat Lampung pada umumnya menolak ajaran agama (Islam) yang radikal, dan sebaliknya mayoritas masyarakat beragama di Lampung lebih menerima ajaran agama yang moderat, ajaran Islam yang lunak.

D. Faktor-faktor Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Lampung

Faktor-faktor penerimaan narasi akan dianalisis juga merupakan tahap akhir penelitian ini. Sebab, Islamisme bekerja pada ruang sosial yang dinamis, yang di dalamnya terdapat

⁴⁴ Arif Mahya, Tokoh Agama/NU dan Tokoh Adat Lampung Saibatin, Wawancara tanggal 1 Juli 2013.

beragam masalah makro dan mikro yang terjadi di masyarakat Lampung. Untuk itu faktor-faktor kunci penerimaan narasi Islamisme dan identitas politik dalam gerakan radikalisme dan terorisme di Lampung agar lebih ahulu dipahami oleh peneliti dalam mengamati subjek penelitian yang terdiri dari delapan kelompok di Lampung.

Menurut Noorhaidi Hasan, dkk., bahwa faktor-faktor kunci penerimaan hamper sama dengan faktor-faktor dan penyebaran narasi yang dilakukan oleh kelompok radikal, antara lain:

1. Mengeksploitasi identitas dasar dan primodial atau politik identitas mereka ditolak oleh kelompok moderat pada umumnya.
2. Penerimaan ideologi radikal juga ditolak oleh publik ,karena tindakan kelompok teroris di Lampung yang merampok BRI di Tanggamus dengan ditentukan secara aliansi dan frustrasi yang dialami oleh seseorang ketika kehilangan identitas dirinya setelah ditangkap polisi.
3. Persoalan-persoalan struktural bahkan cultural sebagai akibat kegagalan pemerintah dan tokoh masyarakat memenuhi permintaan lapangan kerja dan memperbaiki standar kepentingan masyarakat kurang begitu mendapat perhatian di kalangan pemuda yang moderat.
4. Bahkan, kalangan muda dari pelajar (SMAN 2 dan 9 serta MAN 1 Bandar Lampung) dan mahasiswa (LDK UNILA, LDK STIMIK Teknokrat, dan LDK IAIN Raden Intan) tidak mengetahui gerakan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Lampung sebagaimana kelompok teroris yang merampok di BRI Tanggamus. Walaupun sebagian mahasiswa dan siswa kurang perhatian karena mereka lebih disibukkan dengan urusan perkualihan dan pembelajaran, mereka tetap tidak rentan terhadap pengaruh ideologi radikal dan teroris. Mereka tidak berada dalam fase transisi, yakni pencarian dan pembentukan identitas, dan merasakan langsung perubahan sosial tampak dihadapan

mereka boleh jadi tidak adil buat mereka,⁴⁵ karena mereka sudah banyak mendapatkan bekal agama melalui kegiatan Rahis dan LDK yang lebih pada ajaran Islam moderat, dan tidak menerima Islam dengan kekerasan yaitu Islam politik karena mere pun mengetahui secara umum bahwa kelompok radikal sebagai kelompok Islam yang memanipulasi politik untuk tujuan politik identitas.

Kelompok radikal di Lampung, belum secara nyata memiliki jaringan dengan kelompok teroris dari luar Lampung. Terutama dalam hal merekrut keanggotaannya di kalangan pemuda, baik mahasiswa, siswa, dan pemuda pada umumnya di Lampung dipandang tidak efektif. Pada umumnya, sekitar tahun 2011 di mana kampus-kampus dijaga keamanan oleh aparat kepolisian bahkan para polisi turut shalat berjama'ah, tetapi ternyata bahwa kalangan pemuda kampus tidak ada satupun yang terlibat jaringan kelompok teroris di Lampung ataupun di luar Lampung. Seperti di IAIN Raden Intan, terutama LDK dan BEMI maupun BEM Fakultas menggelar seminar dengan judul *Mencegah Rekrutmen NII dari dalam Kampus terhadap Mahasiswa* dengan narasumber Kapolresta Bandar Lampung Bapak Guntor, DR. Abdul Syukur, M.A, dan Safari Daud, S.Ag, M.Kom.I. Begitu pula di kampus UNILA diadakan seminar tentang *Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kampus UNILA* di antara narasumbernya adalah DR. H. Khairuddin tahmid, MH. Bahkan, di Kantor Bupati Lampung Selatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang PMII (PKC) Lampung menggelar seminar yang diikuti oleh sekumpulan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi antara lain IAIN Raden Intan, UNILA, STKIP, STIMIK Darmajaya, STIMIK Teknokrat, UMITRA, UBL, STAIN Metro dan lainnya berjudul *Faktor-Faktor Pendorong Rekrutmen Mahasiswa dalam NII dan Upaya Penangkalannya dalam Tindakan Terorisme dan Radikalisme di Lampung*, di antara pembicara adalah DR. Abdul Syukur, M.Ag dan Safari Daud, S.Ag, M.Ag. Semua peserta dari mahasiswa itu sepakat untuk waspada dan menolak kelompok radikalisme dan terorisme apa pun bentuknya.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 18-19.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Untuk menutup seluruh uraian perlu ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, konstruksi narasi Islamisme yang dikembangkan oleh kelompok radikal di tengah masyarakat Lampung hanya radikal dalam pemikiran Islamisme dan tidak mengarah pada radikalisme gerakan radikalisme dan terorisme. Kelompok radikal dan sesat ini jumlahnya kecil.

Kedua, narasi-narasi Islamisme yang tersebar oleh kelompok radikal dengan berbagai pola penyebaran dan faktor-faktor penyebarannya pula dengan melakukan identifikasi dan memfasilitasi transmisi Islamisme secara umum tidak diterima oleh masyarakat Islam Lampung yang mayoritas merupakan kelompok Islam moderat Lampung.

Ketiga, Narasi-narasi Islamisme di Lampung secara umum tidak memiliki resonansi yang kuat di tengah masyarakat Lampung, sebab masyarakat Lampung mayoritas penduduknya beragama Islam yang moderat, serta Budaya Lampung *Piil Pesanggiri* dan *Adat Muakhi* sangat menolak tindakan kekerasan bahkan terorisme. Begitu pula adat-budaya yang dibawa oleh masyarakat pendatang ke Lampung tidak menerima narasi Islamisme yang disebar oleh kelompok radikal dan kelompok sesat. Sungguhpun terdapat beberapa konflik sosial yang terjadi di Lampung itu adalah criminal murni, bukan tindakan radikalisme dan terorisme. Termasuk kelompok teroris yang beraksi di BRI Tanggamus adalah pelakunya bukan orang Lampung, tetapi kelompok teroris luar yang memiliki jaringan dengan kelompok teroris di Jawa Tengah dan Poso.

2. Rekomendasi

Di samping kesimpulan, perlu pula dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, konstruksi narasi Islamisme agar tidak dikembangkan di tengah masyarakat Lampung, baik oleh kelompok radikal pemikiran ataupun kelompok radikal-teroris.

Kedua, narasi-narasi Islamisme yang tersebar oleh

kelompok radikal dengan berbagai pola dan faktor penyebaran dan penerimaannya supaya dicegah oleh kelompok moderat bersama pemerintah sebab dapat mengancam kesatuan bangsa, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Ketiga, Narasi-narasi Islamisme di Lampung secara umum tidak memiliki resonansi yang kuat di tengah masyarakat Lampung, tetapi harus tetap kita mencegahnya dengan pendekatan pendidikan dan agama yang benar, pendekatan kearifan lokal, dan pendekatan yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, Anies R., “Terorisme dan Hak Asasi Manusia”, dalam *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2006.
- Gumay, Akbar Nugroho, “Peristiwa Terorisme di Lampung”, dalam *AntaraNews*, Sabtu, 11 Mei 2013 07:26 WIB.
- Hadikusuma, Hilman, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Hasan, Noorhaidi, dkk., *Instrumen Penelitian Narasi dan Politik Identitas Pola Penerimaan dan Penyebaran Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta-Jakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga dan BNPT, 2013.
- <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=18&wilayah=Lampung>, 20 September 2013, pukul 15:30
- Kusno, Abi, Abdul Syukur dan Zainuri, *Tarnsformsi Nilai Budaya Masyarakat Lampung dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial-Keagamaan*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2000.
- Mahfuds, Hanifuddin dan L. Hadi Pranoto, “Pelatihan Anti Radikal Terorisme Bagi Pengurus FKPT 10 Propinsi Wilayah Barat dan Tengah”, *Jurnal BNPT*, Jakarta, Juni 2013.
- Mahfuzh, Syaikh Ali, *Bidayatul Mursyidin*, Beirut: Dar al-Ma’arif, 1965
- Makassari, Ridwan al-, dan Ahmad Gaus (ed.), *Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo*, Kajarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Cv. Rajawali Press, 1982.
- Tarmizi, Tasrief(ed.), “Lima Teroris Ditembak Mati di Lampung”, *Antara News*, Sabtu, 11 Mei 2013, 07:17 WIB (EM*A054/a011).